

**STRATEGI DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA TERHADAP
KOREA UTARA PADA TAHUN 2004-2014**

SKRIPSI



Oleh:

Andhika Wahyu Hartanto

17323099

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

**STRATEGI DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA TERHADAP
KOREA UTARA PADA TAHUN 2004-2014**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Andhika Wahyu Hartanto

17323099

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
STRATEGI DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA TERHADAP
KOREA UTARA PADA TAHUN 2004-2014

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1

2

3

Pernyataan Integritas Akademik

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Masukkan tanggal,

Tanda tangan dan nama lengkap mahasiswa

DAFTAR ISI

SKRIPSI	I
HALAMAN PENGESAHAN	III
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	IV
DAFTAR ISI	V
DAFTAR GAMBAR/GRAFIK/TABEL/DIAGRAM	VIII
DAFTAR SINGKATAN	IX
ABSTRAK	X
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	6
1.3 TUJUAN PENELITIAN	7
1.4 CAKUPAN PENELITIAN	7
1.5 TINJAUAN PUSTAKA	9
1.6 KERANGKA PEMIKIRAN	11
1.7 ARGUMEN SEMENTARA	13
1.8 METODE PENELITIAN	14
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	<i>14</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	<i>14</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	<i>15</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	<i>15</i>
1.9 SISTEMATIKA PEMBAHASAN	15
BAB 2	17
DINAMIKA HUBUNGAN BILATERAL DAN PERAN INDONESIA DALAM KERJASAMA DENGAN KOREA UTARA	17
2.1 DINAMIKA HUBUNGAN BILATERAL DAN FAKTOR-FAKTOR	17
2.2 PERAN AKTIF INDONESIA DALAM MENDORONG KERJASAMA EKONOMI DENGAN KOREA UTARA	21
BAB 3	28
MODEL DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA TERHADAP KOREA UTARA PADA MASA PEMERINTAHAN SBY 2004-2014	28
3.1 DIPLOMASI KOMERSIAL	28
3.2 DIPLOMASI PERDAGANGAN	31

3.3 MIGRASI DAN PEKERJA KONSULER	34
BAB 4	38
PENUTUP	38
4.1 KESIMPULAN	38
DAFTAR PUSTAKA	42

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK/TABEL/DIAGRAM

Tabel 1. Nilai Ekspor Impor Korea Utara tahun 2004-2014 (USD).....	30
Tabel 2. Bentuk Diplomasi Indonesia ke Korea Utara.....	47

DAFTAR SINGKATAN

ARF	<i>Forum Regional ASEAN</i>
ASFAF	<i>Friendship Art Festival</i>
CCRFC	<i>Committee for Cultural Relations with Foreign Countries</i>
SBY	Susilo Bambang Yudhoyono
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PIFF	<i>International Film Festival</i>
Polugri	Politik Luar Negeri
PDB	Produk Domestik Bruto
UNICEF	<i>United Nations Children's Fund</i>
WFP	<i>World Food Program</i>

ABSTRAK

Hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Utara dimulai pada 17 Juni 1961. Dalam kurun waktu 2004-2014 perdagangan kedua negara terbatas karena Korea Utara mendapatkan sanksi ekonomi akibat aktivitas nuklir. Namun pada masa SBY nilai ekspor impor Indonesia meningkat dan Korea Utara menjadi salah satu negara yang bekerjasama dalam sektor ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia. Penulis menggunakan Teori Diplomasi Ekonomi oleh Robert A. Denmark yang terbagi ke dalam empat model, yaitu Diplomasi Komersial, Diplomasi Perdagangan, Diplomasi Keuangan, dan Migrasi dan Pekerjaan Konsuler. Argumen sementara penulis, yaitu empat model diplomasi ekonomi dapat diimplementasikan dalam hubungan bilateral dan kerja sama antara Indonesia-Korea Utara. Hasil penelitian, yaitu Diplomasi Komersial terdapat beberapa nota kesepahaman dan perjanjian kedua negara. Diplomasi Perdagangan Indonesia memberikan bantuan pangan dan meningkatnya produk ekspor impor. Diplomasi Keuangan perjanjian Kominfo antara Indonesia dan Korea Utara. Serta Migrasi dan Pekerjaan Konsuler Menlu Indonesia mengirimkan delegasi bisnis ke Korea Utara.

Kata Kunci: Indonesia, Korea Utara, Diplomasi Ekonomi

Diplomatic relations between Indonesia and North Korea began on June 17 1961. In the period 2004-2014 trade between the two countries was limited because North Korea received economic sanctions due to nuclear activities. However, during the SBY era, the value of Indonesia's exports and imports increased and North Korea became one of the countries that collaborated in the economic and trade sectors with Indonesia. The author uses the Economic Diplomacy Theory by Robert A. Denmark which is divided into four models, namely Commercial Diplomacy, Trade Diplomacy, Financial Diplomacy, and Migration and Consular Work. The author's temporary argument is that four models of economic diplomacy can be implemented in bilateral relations and cooperation between Indonesia and North Korea. The results of the research, namely Commercial Diplomacy, contained several memorandums of understanding and agreements between the two countries. Indonesian Trade Diplomacy provides food aid and increases import and export products. Financial Diplomacy, Communication and Information Agreement between Indonesia and North Korea. As well as Migration and Consular Work, the Indonesian Foreign Minister sent a business delegation to North Korea.

Keywords: Indonesia, Korea Utara, *Economic Diplomacy*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Utara dimulai sejak tanggal 17 Juni 1961. Hubungan diplomatik ini dibentuk melalui nota resmi pertukaran negara pada pembukaan kantor konsulat. Indonesia dan Korea Utara telah memiliki hubungan bilateral yang baik selama lebih dari 50 tahun. Hal ini berdasarkan pada kunjungan timbal balik oleh Presiden Soekarno ke Korea Utara pada tahun 1964 dan kunjungan Presiden Kim IL Sung ke Indonesia pada tahun 1965 (Manurung 2020). Pada saat kunjungannya, Kim IL Sung mengungkapkan kekagumannya terhadap Anggrek Indonesia di Kebun Raya Bogor. Sehingga, Soekarno menamai Anggrek tersebut dengan nama pemimpin Korea Utara, yaitu Kimilsungia. Anggrek Kimilsungia menjadi simbol kekuatan Indonesia dan Korea Utara. Meskipun kedua negara memiliki nilai yang berbeda, Indonesia sebagai negara demokrasi dan Korea Utara sebagai negara komunis, akan tetapi hubungan bilateral kedua negara berlangsung dengan baik (Indah Rizki Aruma Nurjannah 2018).

Sedangkan, hubungan politik Indonesia dan Korea Utara kerap kali dilaksanakan dalam kerja sama di forum internasional, seperti Korea Utara mendukung pencalonan Indonesia dalam posisi organisasi internasional PBB dan Non-PBB, serta Non-Blok. Indonesia juga memiliki citra yang positif bagi Korea Utara. Dalam hal ini, Korea Utara mengakui bagaimana inisiatif dan peran Indonesia dalam berbagai forum internasional. Di mana Indonesia dan Korea Utara

menjadi negara anggota yang mengangkat isu-isu mengenai Korea Utara. Sehingga, Korea Utara berharap agar Indonesia memberikan dukungan kepada negara tersebut dalam beberapa kebijakan dan kepentingan nasionalnya.

Setelah 56 tahun berlalu sejak momen pemberian nama Anggrek Kimilsungia oleh Presiden Soekarno kepada Korea Utara, sebuah monumen untuk mengenang Anggrek Kimilsungia secara resmi dibuka di Kebun Raya Bogor. Anggrek Kimilsungia menjadi tanda persahabatan antara Indonesia dan Korea Utara. Anggrek Kimilsungia ditetapkan sebagai bunga nasional Korea Utara yang digemari oleh masyarakat. Bahkan, setiap tahun Anggrek Kimilsungia ditampilkan dalam Festival Bunga Kimilsung di Korea Utara untuk mengenang dan menghormati Presiden Kim IL Sung (Nurjannah 2018).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden Indonesia selama dua periode yaitu 2004-2014. Pada masa Presiden SBY orientasi politik luar negeri Indonesia berfokus pada ranah global yaitu meningkatkan sektor perdagangan dan kerjasama ekonomi dengan negara lain. Salah satu negara yang ditargetkan adalah Korea Utara. Ini untuk memulai kembali hubungan bilateral dan kerjasama dengan Korea Utara yang sebelumnya sempat terbentuk dengan baik. Kembali membaiknya hubungan bilateral Indonesia dan Korea Utara dilihat dari meningkatnya nilai ekspor dan impor Indonesia dan Korea Utara di masa Presiden SBY. Peningkatan ini menunjukkan bahwa orientasi polugri Indonesia yaitu memperkuat kembali hubungan bilateral dan kerjasama ekonomi secara global, salah satunya perdagangan dengan Korea Utara. Ini juga dibuktikan dengan beberapa kali kunjungan menlu Indonesia dan Korea Utara sebagai pejabat negara

untuk mendiskusikan kerjasama ekonomi, perdagangan, hingga investasi.

Pada tahun 2012 Indonesia telah menerima kunjungan ketiga dari Korea Utara yang saat itu dipimpin oleh Kim Yong Nam. Didampingi oleh menteri, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama di sektor ekonomi dan perdagangan. Bahkan, Korea Utara memperlihatkan perubahan mendasar dalam kebijakan luar negerinya yang berfokus pada sektor ekonomi dan perdagangan dibandingkan militer. Meskipun pada masa tersebut, ekspor Indonesia ke Korea Utara masih terbatas dan cenderung kecil karena Korea Utara merupakan negara yang terisolasi dan sering terkena sanksi internasional, sehingga membuat perdagangannya terbatas. Akan tetapi, selama periode SBY ekspor Indonesia ke Korea Utara mencakup berbagai produk, seperti minyak kelapa sawit, produk pertanian dan tekstil, hingga barang elektronik dalam jumlah terbatas.

Pada tanggal 15 Mei 2012 digelarnya pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presidium Majelis Tertinggi Rakyat Korea Utara, Kim Yong Nam di Jakarta dalam acara Presidium. Pertemuan ini merupakan frekuensi bagi pertukaran kunjungan pejabat tinggi kedua negara. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan hubungan bilateral dalam sektor perekonomian dan perdagangan dengan Korea Utara. Peningkatan hubungan bilateral ini didukung dengan kondisi bahwa, pada tahun 2011 Presiden Korea Utara, telah melakukan banyak pembangunan nasional, seperti pembangunan dalam sektor pertambangan batu bara, gedung bertingkat, toko ritel, hingga supermarket di Ibu Kota Korea Utara, Pyongyang (Manurung 2020). Peningkatan pembangunan dalam sektor perekonomian Korea Utara membentuk

Indonesia dan Korea Utara melakukan perdagangan bilateral atas dasar *cash and carry* dengan volume perdagangan yang relatif kecil.

Cash and carry dalam perdagangan Indonesia dan Korea Utara menggambarkan kondisi di mana pembelian barang harus dilakukan dengan pembayaran langsung atau tunai, sehingga Indonesia dan Korea Utara tidak menggunakan sistem utang-piutang dalam kerja sama hubungan bilateral. Hal ini dikarenakan, Korea Utara baru memfokuskan peningkatan pembangunan dalam sektor perekonomian saat ini, sebelumnya peningkatan pembangunan difokuskan pada penguatan militer.

Hubungan bilateral kedua negara semakin erat pada tahun 2012, melalui Program Pangan Dunia pemerintah Indonesia memberikan bantuan senilai 2 Juta Dollar dalam bentuk 1.465 Ton Sawit. Sawit ini akan digunakan untuk suplai bahan makanan masyarakat Korea Utara, seperti ibu menyusui dan anak-anak yang paling rentan. Selain dalam sektor perdagangan, Korea Utara juga mengirimkan dua orang diplomat untuk mengikuti Kursus Pelatihan Internasional dengan kategori Diplomat Pertengahan Karir ke-11, yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Republik Indonesia di Jakarta, pada 20 Oktober-3 November 2013 (Indonesia 2022). Sehingga, total perdagangan Indonesia dan Korea Utara pada tahun 2012-2015 mencapai 342,9 Ribu Dollar (Indonesia 2022).

Pada 21-23 Oktober 2013, Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa melakukan kunjungan kerja ke Pyongyang, Korea Utara. Menlu Indonesia datang sebagai utusan khusus dari Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyerahkan surat dalam pertemuan bersama Presiden Korea

Utara, Kim Yong Nam. Dalam surat tersebut, Presiden SBY menyampaikan bahwa pentingnya hubungan baik Indonesia dan Korea Utara yang telah terjalin selama ini. Sehingga, kedua negara dapat meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan, terutama dalam sektor perekonomian. Selain itu, Presiden SBY juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan, khususnya di Semenanjung Korea. Hal ini juga merupakan prasyarat untuk melanjutkan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di Indonesia maupun di Korea Utara. Dalam kunjungan kali ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil yang telah dicapai ketika kunjungan kenegaraan Presiden Korea Utara pada 15 Mei 2012 sebelumnya. Dalam pertemuan kali ini, Menlu Indonesia juga mengusulkan untuk mengadakan kunjungan misi bisnis Indonesia dan Korea Utara untuk menjajaki peluang kerja sama perekonomian kedua negara, seiring dengan dibukanya kawasan ekonomi khusus di setiap provinsi Korea Utara (Santi, SBY Kirim Surat untuk Pemimpin Korea Utara 2013).

Indonesia dan Korea Utara terus melakukan kerja sama bilateral, terutama dalam sektor ekonomi dan perdagangan dengan prinsip saling menghormati. Dalam kurun waktu 2004-2014 perdagangan kedua negara memang terbatas dan relatif kecil karena Korea Utara mendapatkan sanksi ekonomi dari banyak negara akibat aktivitas nuklir dan pelanggaran HAM. Sehingga, perdagangan menjadi terbatas. Akan tetapi, pada masa pemerintah SBY nilai ekspor impor Indonesia meningkat dan Korea Utara menjadi salah satu negara yang bekerjasama dalam sektor ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia. Meskipun, Korea Utara memiliki perdagangan internasional yang terbatas namun Indonesia merupakan salah satu

negara yang melakukan impor ekspor dengan Korea Utara pada masa tersebut.

Kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Korea Utara pada masa pemerintahan Presiden SBY fokus politik luar negeri Indonesia salah satunya adalah memperkuat jaringan kerja sama perekonomian secara global, seperti meningkatkan nilai ekspor impor. Sehingga, Menlu Indonesia pada masa pemerintahan Presiden SBY banyak melakukan kunjungan kerja sama ekonomi ke Korea Utara. Saat itu, kebijakan politik luar negeri negara tersebut berfokus pada peningkatan kerja sama dalam sektor perekonomian dan perdagangan. Hal ini ditandai dengan kunjungan pertama Korea Utara ke Indonesia pada tahun 2012 untuk membahas mengenai kerja sama perdagangan dan meningkatkan *capacity building partnership* dengan Indonesia.

Sehingga, pada periode tersebut hubungan bilateral Korea Utara dalam ranah internasional telah berubah dan berbagai peristiwa geopolitik telah mempengaruhi dinamika perdagangan internasional. Produk ekspor impor Indonesia dan Korea Utara seperti minyak kelapa sawit, produk pertanian, produk tekstil, barang konsumen, hingga barang elektronik. Maka, penelitian ini ingin melihat bagaimana hubungan bilateral dan kerja sama Indonesia dan Korea Utara terutama dalam sektor ekonomi dan perdagangan terutama di masa Presiden SBY dan di tengah sanksi ekonomi yang dijatuhkan negara-negara internasional terhadap Korea Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi

diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Korea Utara pada tahun 2004-2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat bagaimana dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Korea Utara dalam masa kepemimpinan Presiden SBY mulai tahun 2004-2014 dari kerja sama yang dilakukan dalam sektor perdagangan, dan perekonomian.

1.4 Cakupan Penelitian

Penulis mengambil tahun penelitian mulai dari 2004-2014 dikarenakan ini merupakan masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam rentang waktu tersebut, Presiden SBY menjabat selama dua periode sebagai Presiden Indonesia. Pemilihan tahun ini dimulai pada tahun 2004 dikarenakan, pada masa Presiden SBY orientasi politik luar berfokus pada ranah regional dan global, terutama dalam meningkatkan sektor perdagangan dan kerjasama ekonomi dengan negara lain. Orientasi polugri tersebut mendorong Indonesia untuk menjadi mediator bagi negara berkonflik, seperti Korea Utara dan Korea Selatan melalui kerja sama ekonomi dan perdagangan. Dimana nilai ekspor impor Indonesia pada masa pemerintahan SBY cenderung meningkat. Satu tahun setelah menjabat sebagai presiden Indonesia ekspor Indonesia meningkat. Salah satu negara tujuan ekspor Indonesia adalah Korea Utara. Ini sebagai penguat hubungan bilateral kedua negara. Kemudian, nilai impor Indonesia juga meningkat dalam kurun waktu yang sama

pada masa pemerintahan SBY, yaitu senilai 57.701 pada tahun 2005, kemudian senilai 61.066 pada tahun 2006, dan senilai 74.473 pada tahun 2007 (Badan Pusat Statistik 2005-2007). Meningkatkan nilai ekspor impor Indonesia menunjukkan orientasi polugri SBY terhadap ranah global, salah satunya adalah memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama ekonomi perdagangan dengan Korea Utara. Polugri ini berlangsung hingga pada tahun 2014 setelah Presiden SBY selesai menjabat.

Meskipun pada masa tersebut, ekspor Indonesia ke Korea Utara masih terbatas dan cenderung kecil karena Korea Utara merupakan negara yang terisolasi dan sering terkena sanksi internasional, sehingga membuat perdagangannya terbatas. Akan tetapi, selama periode SBY ekspor Indonesia ke Korea Utara mencakup berbagai produk, seperti minyak kelapa sawit, produk pertanian dan tekstil, hingga barang elektronik dalam jumlah terbatas. Bahkan, disebutkan bahwa perdagangan Indonesia dan Korea Utara tumbuh lebih dari 45% dalam kurun waktu 2008-2013. Di mana ini merupakan contoh nyata bahwa perekonomian dan perdagangan menjadi salah satu sektor penting dalam pembahasan hubungan bilateral kedua negara. Selain itu, kedua negara memiliki peluang untuk mengembangkan kerja sama dalam sektor perdagangan dan membentuk kemitraan peningkatan kapasitas atau *capacity building partnership* (Santi 2013). Pada tahun 2012 Indonesia telah menerima kunjungan ketiga dari Korea Utara yang saat itu dipimpin oleh Kim Yong Nam. Didampingi oleh menteri, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama di sektor ekonomi dan perdagangan. Bahkan, Korea Utara memperlihatkan

perubahan mendasar dalam kebijakan luar negerinya yang berfokus pada sektor ekonomi dan perdagangan (Mahamel 2012).

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam jurnal yang ditulis oleh Dick K. Nanto dan Emma Chanlett-Avery dengan judul *The North Korean Economy: Overview and Policy Analysis* (K. Nanto and Chanlett-Avery 2007). Dalam pembahasannya dapat disimpulkan bahwa, perekonomian Korea Utara menjadi perhatian Kongres karena menyediakan sumber daya keuangan dan industri bagi Pyongyang untuk mengembangkan militer dan menciptakan ketidakstabilan yang berdampak. Ancaman Korea Utara untuk menjual bahan senjata nuklir mungkin sebagian disebabkan oleh kebutuhan Pyongyang untuk menghasilkan pendapatan ekspor. Kondisi ekonomi di Korea Utara saat ini tampak membaik namun suram bagi negara-negara yang berada di luar pusat kekuasaan. Negara ini telah memulai program reformasi ekonomi yang mencakup kenaikan upah, mengurangi ketergantungan pada penjatahan komoditas penting, mengurangi kendali terpusat atas operasional pabrik, dan membuka zona perdagangan luar negeri untuk investasi internasional.

Kedua, dalam jurnal yang ditulis oleh Hendra Manurung dengan judul *Indonesia-North Korea Diplomatic Relations: Effort to Pursue National Interest and Create Regional Peace* dalam jurnal *Politica* Vol 11. No 2, pada November 2020 (Manurung 2020) yaitu dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Korea Utara. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia terus meningkatkan hubungan kerjasama dengan Korea Utara dalam sektor perekonomian. Hal ini dikarenakan, sejak tahun 2011 Korea Utara memfokuskan pembangunan dalam negeri, seperti

pembangunan pertambangan batu bara, gedung bertingkat, toko ritel, dan supermarket di Ibu Kota Korea Utara, Pyongyang. Bahkan, Korea Utara juga memfokuskan pembangunannya dalam sektor penguatan militer dan ekonomi. Hubungan bilateral kedua negara telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun. Hal ini dimulai ketika adanya kunjungan presiden kedua negara pada tahun 1964-1965. Dimana, saat itu Presiden Korea Utara Kim IL Sung memperlihatkan ketertarikannya terhadap Anggrek Indonesia, sehingga Presiden Soekarno menamakan Anggrek tersebut dengan nama Anggrek Kimilsungia. Dalam hal ini, Indonesia juga memiliki citra positif di Korea Utara. Hal ini dikarenakan Indonesia berperan aktif dalam berbagai forum internasional untuk mengangkat isu-isu Korea Utara. Sehingga, kedua negara saling mengharapkan dukungan terhadap kebijakan dan kepentingan pemerintah negara. Kedekatan kedua negara juga diperlihatkan melalui dukungan yang diberikan oleh Korea Utara dalam pencalonan Indonesia di berbagai jabatan organisasi internasional, khususnya dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Non-PBB, hingga Non-Blok. Bahkan, kunjungan pejabat tinggi kedua negara meningkat, seperti pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presidium Presiden Kim Yong Namon pada tahun 2012 di Jakarta.

Ketiga, dalam jurnal yang ditulis oleh Cesar Ducruet yang berjudul *Hub dependence in constrained economies: the case of North Korea* pada Agustus 2008 (Ducruet 2008). Jurnal ini menjelaskan bahwa, Korea Utara memiliki ketergantungan terhadap perekonomian kelautan. Hal ini dikarenakan, isu geopolitik dan perdagangan perekonomian Korea Utara memiliki fokus pada sektor maritim. Hal ini merupakan salah satu bentuk tujuan perekonomian dan

perdagangan Korea Utara.

Argumen yang disusun adalah bahwa, penulis telah mengetahui dan mengakui jika terdapat penelitian sebelumnya yang membahas hubungan Indonesia dan Korea Utara dalam sektor ekonomi dan perdagangan. Maka, penelitian ini akan melengkapi penelitian terdahulu dengan pembahasan yang berfokus pada dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Korea Utara dalam sektor ekonomi dan perdagangan melalui kerja sama bilateral kedua negara terutama di masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004-2014.

1.6 Kerangka Pemikiran

Diplomasi Ekonomi oleh Donna Lee dan Brian Hocking

Konsep yang digunakan pada penulisan ini diambil dari '*Economic Diplomacy*' yang ditulis oleh Donna Lee dan Brian Hocking (Donna and Hocking 2010). Perkembangan Internasional telah mendorong dan berdampak pada sejumlah kondisi perekonomian satu negara.

Diplomasi ekonomi adalah satu cara yang digunakan untuk menjalankan kebijakan luar negeri suatu negara atau upaya untuk mencapai keamanan ekonomi suatu negara. Diplomasi terbatas pada penggunaan alat diplomasi tradisional yang bertujuan untuk mencapai tujuan perekonomian suatu negara. Di mana, diplomasi ekonomi bersifat antar pemerintah yang dilakukan oleh pejabat luar negeri, seperti Menlu dan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kepentingan ekonomi negara tersebut (Donna and Hocking 2010).

Dalam konsep ini terdapat empat pendekatan dalam diplomasi ekonomi, yaitu;

1. Diplomasi Komersial

di luar negeri apabila terdapat suatu masalah, serta mencari mitra bisnis untuk menjalankan hubungan perdagangan dan perekonomian dengan negara lain. Pada pendekatan diplomasi komersial ini dilakukan untuk membangun kerja sama ekonomi antar kedua negara (Donna and Hocking 2010).

2. Diplomasi Perdagangan

Diplomasi Perdagangan di mana adanya tawar menawar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Tawar menawar atau negosiasi ini dilakukan oleh diplomat kepada negara atau aktor politik lainnya dalam perjanjian perdagangan multilateral, regional, maupun bilateral. Dalam diplomasi perdagangan tidak hanya melalui peran negara namun juga peran aktor non-negara dalam hubungan perdagangan multilateral, regional, dan bilateral. Selain itu, diplomasi perdagangan juga melihat perkembangan perdagangan bebas bilateral antar negara (Donna and Hocking 2010).

3. Diplomasi Keuangan

Diplomasi Keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk menstabilkan perekonomian satu negara yang tidak memiliki hukum dan aturan mengenai rezim perdagangan internasional. Pengaruh dari forum kerja sama ekonomi seperti G7, G8, G20 juga berpengaruh dalam upaya stabilisasi perekonomian kepada negara yang tidak memiliki keterikatan erat terhadap rezim perdagangan. Pendekatan juga dilakukan oleh IMF dan juga WB dalam memberikan bantuan saat adanya krisis ekonomi yang terjadi di suatu negara. Dalam hal ini, menggunakan aktor diplomasi non-tradisional, seperti kementrian keuangan, bank sentral, dan kelompok bisnis (Donna and Hocking

2010).

4. Migrasi dan Pekerjaan Konsuler

Dalam pendekatan ini adalah melihat dari arus pekerja yang disalurkan antar negara dan juga berfokus kepada layanan visa. Mesmperlihatkan bagaimana perubahan perekonomian dunia. Tingginya arus pekerja migran dari suatu negara telah menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi telah berkembang dengan pesat (Donna and Hocking 2010).

Oleh karena itu penulis akan menggunakan tiga model dalam diplomasi ekonomi yaitu diplomasi komersial, diplomasi perdagangan, dan migrasi dan pekerja konsuler. Ketiga diplomasi ekonomi ini akan penulis gunakan untuk menganalisis perkembangan hubungan bilateral Indonesia dan Korea Utara dalam sektor ekonomi perdagangan pada masa Presiden SBY tahun 2004-2014. Namun penulis tidak menggunakan diplomasi keuangan. Dalam strategi diplomasi ekonomi Indonesia ke Korea Utara tidak adanya model pendekatan diplomasi keuangan yang dilakukan dari kedua negara. Hal ini dikarenakan tidak terlihatnya upaya aktif Indonesia dalam menjalankan model strategi ini terhadap Korea Utara, dan tercatat hanya strategi model diplomasi ekonomi lainnya yang dijalankan oleh Indonesia. Maka penulis hanya akan menggunakan model diplomasi komersial, diplomasi perdagangan, dan migrasi dan pekerja konsuler.

1.7 Argumen Sementara

Maka, penulis akan menggunakan empat model utama dalam diplomasi ekonomi untuk menganalisis perkembangan hubungan bilateral Indonesia dan Korea Utara

dalam melaksanakan kerja sama ekonomi dan perdagangan, terutama di masa Presiden SBY yang berlangsung pada tahun 2004-2014. Pada model diplomasi komersial, Indonesia dan Korea Utara membuka peluang baru bagi perdagangan dan investasi di pasar internasional melalui aktor negara, non-negara (swasta), hingga melibatkan kemenlu. Sedangkan, pada model diplomasi perdagangan telah dilalui dengan metode tawar menawar antara pemerintah dengan negara-negara aktor negara lainnya yang dilakukan oleh diplomat kepada negara serta aktor politik lainnya. Kemudian, model diplomasi keuangan telah melibatkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan stabilitas dalam rezim yang tidak memiliki aturan dan hukum mengenai rezim perdagangan internasional. Serta, model migrasi dan pekerjaan konsuler di mana meningkatnya arus pekerja migran antara Indonesia dan Korea Utara.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif untuk memberikan pemahaman terhadap gejala sosial yang akan dikaji secara rinci (Hardani 2020, #). Dalam penelitian jenis ini, bahan yang diambil adalah berdasarkan atas bahan-bahan yang telah terpublikasikan, seperti buku, jurnal, artikel media massa, berita, hingga surat kabar. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kredibilitas atas penelitian ini.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Indonesia sebagai aktor negara yang

melakukan diplomasi terhadap Korea Utara. Sedangkan, objek dalam penelitian ini adalah hubungan bilateral Indonesia dan Korea Utara.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode data sekunder melalui buku, jurnal, artikel media massa, berita, hingga surat kabar untuk memberikan informasi yang akan diteliti.

1.8.4 Proses Penelitian

Pra-Pendahuluan

Penelitian ini akan mengumpulkan data-data melalui dokumentasi yang telah terpublikasi sebagai informasi.

Pengolahan Data

Penelitian ini tidak langsung turun lapangan, sehingga peneliti melakukan analisis data melalui sumber-sumber yang kredibel.

Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, maka akan melalui tahap analisis untuk memberikan pemetaan terhadap permasalahan yang akan diteliti.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB I berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang dan rumusan masalah. Bagian ini akan menjelaskan pembahasan utama mengenai hubungan bilateral Indonesia dan Korea Utara di masa kepemimpinan presiden SBY 2004-

2014.

BAB II akan menjelaskan akan membahas mengenai konteks dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Korea Utara di masa kepemimpinan SBY dalam sektor ekonomi dan perdagangan.

BAB III berisi mengenai aplikasi teori/landasan konseptual yaitu diplomasi ekonomi untuk membedah hubungan bilateral Indonesia dan Korea Utara.

BAB IV berisikan mengenai kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian dan rekomendasi kebijakan atau peneliti selanjutnya, apabila diperlukan.

BAB 2

DINAMIKA HUBUNGAN BILATERAL DAN PERAN INDONESIA DALAM KERJASAMA DENGAN KOREA UTARA

2.1 Dinamika Hubungan Bilateral dan Faktor-Faktor

Hubungan bilateral Indonesia dan Korea Utara dimulai dengan adanya pertukaran Nota Kesepahaman. Hal ini bertujuan untuk membuka konsulat jenderal di masing-masing negara pada tahun 1961 (KBRI Pyongyang 2019). Saat itu, Indonesia dan Korea Utara memiliki minat dan visi yang sama, yaitu tidak bergabung dengan blok manapun. Hal ini didukung dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Kemudian pada tahun 1964 Presiden Indonesia, Soekarno mengadakan kunjungan ke Korea Utara. Kunjungan ini diikuti dengan kunjungan balik oleh Presiden Korea Utara, Kim Il-Sung pada tahun 1965. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Soekarno menamai salah satu jenis Bunga Anggrek di Kebun Raya Bogor dengan nama Kimilsungia. Di mana bunga tersebut merupakan bunga kebangsaan di Korea Utara (Cook 2018). Selanjutnya dalam hubungan bilateral hingga forum internasional, Indonesia dan Korea Utara terus menjalin kerja sama dan menjaga baik hubungan bilateral kedua negara. Dalam sistem internasional, Korea Utara dijatuhkan sanksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sanksi tersebut merupakan tuduhan terhadap keterlibatan negara dalam aktivitas terorisme dan pelanggaran terhadap sanksi-sanksi terdahulu (Bloomberg 2019). Akan tetapi, di tengah sanksi internasional Indonesia terus membangun hubungan baik dengan Korea Utara. Salah satu bentuk hubungan baik Indonesia dan Korea Utara dilaksanakan melalui perdagangan.

Selama masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hubungan bilateral Indonesia dan Korea Utara semakin baik. Bahkan, Indonesia dan Korea Utara sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam berbagai sektor. Salah satu sektor kerjasama Indonesia dan Korea Utara adalah di bidang perdagangan, investasi, politik, hingga kebudayaan antar negara. Bahkan, sebagai salah satu fokus kerjasama dalam sektor perdagangan, pemerintah kedua negara menggarisbawahi untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang obat tradisional. Selain itu, kedua negara juga ingin meningkatkan kerjasama dalam sektor olahraga (Zaenal. A 2012).

Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa menyampaikan dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta pada Mei 2012 setelah mendampingi Presiden SBY dalam kunjungan kehormatan bersama dengan Presiden Korea Utara, Kim Yong Nam di Istana Merdeka. Marty mengatakan bahwa, hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Utara yang sudah berlangsung cukup lama menjadi salah satu modal dalam meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara (Zaenal. A 2012).

Salah satu hal yang ditekankan oleh pemerintah Indonesia dan Korea Utara dalam pertemuan tersebut adalah peningkatan hubungan bilateral dengan meningkatkan kerja sama secara politik dan melakukan kunjungan pejabat antar kedua negara. Bahkan, Presiden SBY telah menunjuk secara khusus Menko Perekonomian, yaitu Hatta Rajasa, Menteri Perdagangan, yaitu Gita Wirjawan, dan Menteri Perindustrian, yaitu Hidayat untuk menindaklanjuti pembicaraan mengenai kerjasama dalam sektor ekonomi dan perdagangan dengan Korea Utara (Zaenal. A 2012).

Meskipun kerjasama Indonesia dan Korea Utara tidak selalu berlangsung

secara terus menerus. Akan tetapi terdapat faktor-faktor yang mendorong kerjasama Indonesia dan Korea Utara. Meskipun Korea Utara merupakan salah satu negara dengan ekonomi yang tidak kuat. Umumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama kedua negara seperti, keputusan dalam meningkatkan kerjasama ekonomi dengan melibatkan pertimbangan ekonomi, politik, keamanan, hingga sektor strategis. Terdapat beberapa faktor yang mendorong kerjasama Indonesia dan Korea Utara, yaitu: (Zaenal. A 2012).

1. Sektor ekonomi, dimana negara memiliki potensi ekonomi yang besar untuk meningkatkan kerjasama dalam sektor bisnis dan investasi. Seperti diversifikasi pasar melalui ekspor impor.
2. Peluang dalam sektor investasi, bisnis, dan perekonomian, dimana negara lebih melihat kesempatan dan peluang dalam kegiatan investasi dan kegiatan bisnis yang saling menguntungkan. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kerjasama kedua negara, terutama dalam sektor ekonomi dan perdagangan.
3. Sektor keamanan dan stabilitas, dimana kondisi dan stabilitas politik suatu negara menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan hubungan kerjasama.
4. Sektor kebijakan luar negeri, dimana salah satu pertimbangan kerjasama kedua negara adalah afiliasi dengan blok regional maupun organisasi internasional. Namun, baik Indonesia maupun Korea Utara tidak memiliki afiliasi, sehingga keputusan dalam kerjasama ekonomi tidak terpengaruh akan hal tersebut.

5. Kesamaan nilai dan tujuan, dimana kesamaan dalam segi nilai, norma, dan prinsip menjadi salah satu faktor terbentuknya kerjasama kedua negara. Hal ini dikarenakan, apabila terjadi ketidaksamaan atau perbedaan, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu pengaruh dan hambatan dalam kerjasama kedua negara.

Dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Korea Utara pada masa SBY cenderung lebih sejalan dengan pendekatan luar negeri Indonesia yang mengedepankan diplomasi, dialog, dan kerjasama. Kerjasama Indonesia dan Korea Utara berlangsung secara terbatas dalam sektor ekonomi dan politik. Salah satu penyebabnya adalah isu nuklir dan peluncuran rudal oleh Korea Utara, sehingga mendapatkan kecaman internasional. Akan tetapi, Indonesia menanggapi isu nuklir dengan membuka dialog bersama Korea Utara. Hal ini dikarenakan, tanggapan dan reaksi dari Indonesia mengenai nuklir Korea Utara mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara (K. Nanto and Chanlett-Avery 2007).

Presiden SBY lebih menekankan pendekatan melalui diplomasi dan dialog, terutama dalam menangani isu-isu global. Presiden SBY mendukung solusi damai dan berupaya dalam diplomasi internasional untuk menyelesaikan permasalahan ketegangan di Semenanjung Korea. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia adalah berpartisipasi dalam forum internasional, seperti dalam isu PBB mengenai isu Korea Utara. Sikap Indonesia mengenai penyelesaian damai dan partisipasi Indonesia dalam upaya diplomasi internasional dapat membentuk dinamika hubungan bilateral. Hal ini dikarenakan, perbedaan ekonomi dan rendahnya volume perdagangan juga dapat menyebabkan dan mempengaruhi hubungan ekonomi kedua negara, terutama

dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan (Nanto and Chanlett-Avery 2009).

Selain itu, dalam dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Korea Utara salah satu yang memainkan peran penting adalah mengenai tata kelola pemerintah. Adapun ketidakpastian politik juga berdampak terhadap kemampuan kedua negara dalam melaksanakan hubungan bilateral. Kemudian, perkembangan regional dan global termasuk dalam perubahan geopolitik, kebijakan luar negeri global, dan dinamika keamanan regional yang menjadi salah satu faktor mempengaruhi antara Indonesia dan Korea Utara.

Hubungan bilateral Indonesia dan Korea Utara yang telah terbentuk sejak lama, telah mendorong kedua negara untuk saling membangun dan meningkatkan kerjasama, terutama pada masa kepemimpinan Presiden SBY kerjasama ini berfokus pada sektor perdagangan dan ekonomi. Hal ini merupakan salah satu bentuk kebijakan polugri SBY untuk bekerjasama dengan Korea Utara dan berfokus pada sektor kebijakan luar negeri di ranah internasional.

2.2 Peran Aktif Indonesia dalam Mendorong Kerjasama Ekonomi dengan Korea Utara

Hubungan bilateral Indonesia dan Korea Utara serta kerjasama kedua negara pada masa Presiden SBY (2004-2014) memang tidak berkembang secara signifikan. Namun, kedua negara berfokus pada peningkatan diplomasi, politik, dan hubungan bilateral. Serta salah satu fokus kerjasama kedua negara adalah perdagangan dan investasi, serta sektor ekonomi. Dalam sektor ekonomi, pemerintah Indonesia melakukan beberapa peran pada masa kepemimpinan Presiden SBY untuk mendorong kerjasama kedua negara (Nanto and Chanlett-Avery 2009).

Peran aktif yang dilakukan oleh Presiden SBY dalam mendukung kerjasama dan hubungan bilateral dengan Korea Utara, diantaranya adalah kunjungan tingkat tinggi antara pemerintah Indonesia dan Korea Utara, serta pejabat tinggi lainnya. Dimana kunjungan tersebut memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk meningkatkan potensi kerjasama. Kemudian, Indonesia juga berperan sebagai anggota dalam berbagai forum internasional. Maka, dengan memanfaatkan forum internasional kedua negara dapat mempromosikan kerjasama ekonomi. Salah satu adalah melalui pertemuan di forum regional dan internasional, seperti ASEAN. Dimana Indonesia berperan aktif dalam dialog ekonomi dan perdagangan. Dialog ekonomi ini melibatkan negara-negara yang berada di wilayah Asia Timur, salah satunya adalah Korea Utara.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga berperan aktif untuk mempromosikan potensi investasi di Indonesia kepada pelaku-pelaku usaha di Korea Utara. Salah satu investasi yang difokuskan oleh Indonesia adalah di sektor pertanian, energi, dan industri manufaktur. Kemudian, peran aktif Indonesia untuk membangun kerjasama dan menjaga hubungan bilateral yang baik dengan Korea Utara adalah membangun kerjasama di bidang kemanusiaan. Dimana Korea Utara sebagai negara yang terlibat dalam permasalahan HAM secara internasional. Indonesia memberikan bantuan kepada Korea Utara dalam aspek kemanusiaan, seperti bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan pertukaran budaya. Adapun, berbagai peran yang dilakukan oleh Indonesia dapat membuka peluang kerjasama Indonesia dan Korea Utara dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara (Kim, Timothy and Han 2007).

Pada Mei 2012, Presiden SBY menerima kedatangan Presiden Korea Utara,

Kim Yong-Nam. Pertemuan tersebut membahas mengenai peningkatan kerjasama kedua negara. Peningkatan kerjasama berfokus untuk memastikan bahwa, kawasan Asia Pasifik menjadi kawasan yang damai dan bertumbuh, sehingga kerjasama kedua negara juga mengedepankan masalah geopolitik di kawasan (Viva.News 2012). Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai kontroversi peluncuran roket satelit milik Korea Utara. Di mana peluncuran roket satelit Korea Utara mendapatkan protes dari negara-negara Barat, Korea Selatan, hingga Jepang. Menurut Korea Utara sangat disayangkan apabila negara-negara mencurigai peluncuran roket satelit sebagai peluncuran rudal nuklir. Akan tetapi Presiden SBY menanggapi dengan pernyataan bahwa, alangkah lebih baik untuk setiap persoalan yang terjadi di Semenanjung Korea diselesaikan dengan dialog dan komunikasi agar menghindari kesalahpahaman. Presiden SBY juga mengatakan bahwa, setiap pihak baiknya menahan diri dan mengutamakan perdamaian dan stabilitas kawasan, seperti kawasan Semenanjung Korea. Sebab kawasan tersebut merupakan salah satu kawasan yang paling berbahaya di Asia Pasifik (BBC News Indonesia 2012).

Ini merupakan salah satu langkah yang diambil Indonesia dalam meningkatkan kerjasama dan mempertahankan hubungan bilateral yang baik dengan Korea Utara. Hal ini juga mendorong pertemuan selanjutnya antara Indonesia dan Korea Utara, yaitu Jamuan Kenegaraan. Indonesia juga mengambil sikap dalam aktivitas pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara. Dimana Indonesia menyesuaikan posisi untuk mendorong dan mendesak Korea Utara dalam meningkatkan hal-hal mengenai HAM, salah satunya yang dilakukan Indonesia

adalah dengan tidak lagi menentang resolusi mengenai Korea Utara di PBB. Akan tetapi, pertemuan pemerintah kedua negara tidak hanya membahas mengenai isu-isu aktual, namun juga menyepakati peningkatan kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan. Bahkan mengenai kerjasama olahraga dan kebudayaan. Meskipun Korea Utara saat ini terkena sanksi ekonomi dari PBB dan negara Barat. Namun sikap Indonesia dalam hal ini adalah menganggap penting hubungan ekonomi Indonesia dan Korea Utara (BBC News Indonesia 2012).

Kemudian, pada Agustus 2014, Presiden SBY akan menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Su Yong di Kantor Presiden. Menlu Korea Utara didampingi oleh Dirjen Kemenlu Korea Utara untuk Asia dan Duta Besar Korea Utara untuk Indonesia. Sedangkan, Presiden SBY didampingi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, serta didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Dalam pertemuan tersebut juga dilaksanakan upacara penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera dan Bintang Jasa (Maharani 2014).

Dalam diplomasi komersial, globalisasi dapat memberikan dua dampak, yaitu meningkatkan pendanaan untuk ekspor impor dan investasi, serta dukungan di kemenlu. Meskipun pada masa Presiden SBY hubungan kerjasama ekonomi Indonesia dan Korea Utara terbatas, namun terdapat beberapa kegiatan ekspor dan impor yang berlangsung di antara kedua negara. Salah satu komoditas ekspor utama Indonesia ke Korea Utara adalah minyak kelapa, kopi, dan teh. Namun terdapat diversifikasi ekspor Indonesia ke Korea Utara akibat keterbatasan permintaan dan

kondisi ekonomi di Korea Utara. Adapun impor Korea Utara ke Indonesia memiliki perdagangan yang relatif kecil. Salah satu produk impor Korea Utara ke Indonesia adalah pertanian dan barang-barang konsumsi (Badan Pusat Statistik 2005-2007).

Minimnya ekspor impor dan perdagangan yang terjadi antara Indonesia dan Korea Utara disebabkan oleh ketegangan politik dan keamanan di Korea Utara, salah satunya adalah isu mengenai nuklir. Kemudian, kondisi ekonomi global juga mempengaruhi dinamika perdagangan dan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Sehingga, terdapat beberapa faktor, seperti kebijakan luar negeri, perdagangan internasional, dan isu geopolitik yang mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dan Korea Utara. Salah satu program antara Indonesia dan Korea Utara adalah Program Pangan Dunia. Dimana Indonesia memberikan bantuan senilai 2 Juta Dollar dalam bentuk 1.465 Ton Sawit yang digunakan untuk suplai bahan makanan ke Korea Utara.

Perkembangan diplomasi perdagangan mencakup pertumbuhan organisasi perdagangan, seperti WTO, serta perluasan agenda pembicaraan perdagangan dalam pembahasan isu-isu seperti internet. Namun perdagangan Indonesia dan Korea Utara terbatas sehingga tidak mencapai tingkat yang signifikan yang disebabkan oleh perbedaan struktur ekonomi, geografis, hingga keterbatasan akses pasar. Seperti isolasi yang menyebabkan hambatan bagi perdagangan kedua negara. Serta menjadi kendala bagi perusahaan Indonesia yang ingin berbisnis dengan Korea Utara. Akan tetapi, Indonesia menjadi salah satu mitra dagang dengan negara yang memiliki potensi ekonomi lebih besar. Sehingga, Korea Utara bukan menjadi salah satu prioritas dalam agenda perdagangan Indonesia (Kim, Timothy and Han 2007).

Kemudian faktor perdagangan Indonesia dan Korea Utara dalam hal ini, menggunakan aktor diplomasi non-tradisional, seperti kementerian keuangan, bank sentral, kelompok bisnis dan perbankan serta forum diplomatik non-tradisional. Dalam sektor perdagangan dan perekonomian, Korea Utara memiliki ketertarikan untuk mempelajari pola investasi asing di Indonesia. Serta, pemerintah Korea Utara meminta untuk membentuk kerjasama dalam sektor investasi bersama Indonesia. Menurut Menlu Indonesia, Presiden Korea Utara, Kim Yong Nam merujuk pada kerjasama dalam sektor bidang obat tradisional. Ini juga mendorong kerjasama ekonomi kedua negara. Presiden Yudhoyono, lanjut Marty, telah meminta Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Menteri Perindustrian MS Hidayat untuk menindaklanjuti rencana kerjasama tersebut (Antara Kalbar 2012). Ketertarikan untuk mempelajari pola investasi dari Korea Utara disampaikan dalam pertemuan pada Mei 2012. Menlu Indonesia menyampaikan bahwa, ada minat yang cukup tinggi dari Korea Utara untuk melirik masalah-masalah pembangunan ekonomi, investasi, dan lain-lain sebagai masalah yang penting bagi kedua negara. Korea Utara meminati mengenai bagaimana Indonesia bisa mengatur investasi asing (Antara Kalbar 2012).

Faktor terakhir yang juga mempengaruhi perdagangan dan hubungan bilateral Indonesia Korea Utara adalah meningkatnya arus pekerja migran. Akan tetapi, pada masa pemerintahan SBY hubungan bilateral Indonesia dan Korea Utara mengenai pekerja migran pada masa tersebut terbatas. Hal ini disebabkan oleh peraturan ketenagakerjaan, kebijakan migrasi, dan permintaan tenaga kerja asing yang sedikit dari Korea Utara. Selain itu, Indonesia sering menghadapi isu perlindungan dan

kesejahteraan pekerja migran. Dimana Presiden SBY berkomitmen untuk melindungi hak pekerja migran dengan kebijakan dan mekanisme perlindungan yang telah ada. Sehingga pekerja migran layak untuk bekerja di Korea Utara (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pyongyang 2015).

Pada masa SBY, mungkin terdapat perjanjian atau kesepakatan bilateral antara Indonesia dan Korea Utara terkait dengan pekerja migran. Peraturan ini dapat memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja migran serta perlindungan mereka. Kemudian, diplomasi Indonesia dalam hal ketenagakerjaan, termasuk perlindungan pekerja migran, dapat mempengaruhi hubungan dengan Korea Utara. Upaya diplomasi dan dialog dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan pekerja migran dan memastikan hubungan yang baik antara kedua negara. Maka, Indonesia tidak memiliki hubungan yang kuat mengenai pekerja migran di Korea Utara (Nanto and Chanlett-Avery 2009).

Pada masa kepemimpinan SBY, Korea Utara bukan merupakan salah satu destinasi utama bagi pekerja migran Indonesia. Kebijakan dan permintaan tenaga kerja asing Korea Utara tidak sebesar negara-negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia atau Hong Kong. Karakteristik rezim Korea Utara yang terisolasi dan adanya pembatasan akses bagi warga asing dapat menjadi kendala bagi penempatan pekerja migran Indonesia di negara tersebut. Pada masa SBY pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan penempatan pekerja migran di negara-negara lain yang menawarkan lebih banyak peluang dan manfaat ekonomi bagi pekerja migran, seperti di Timur Tengah dan Asia Tenggara.

Hubungan bilateral Indonesia yang dimulai sejak lama telah mendorong

Indonesia untuk membangun kembali kerja sama. Upaya penguatan ini dilakukan oleh aktor negara melalui Kemenlu Indonesia. Sehingga kerja sama kedua negara terbatas pada dialog politik, ekonomi, dan perdagangan meskipun bukan sebagai negara dengan tujuan utama kegiatan ekspor impor. Indonesia banyak melakukan peran aktif dalam diplomasi ekonomi dengan Korea Utara, seperti upaya yang dilakukan oleh aktor negara. Sehingga ini merupakan gambaran bagaimana peran aktif Indonesia dalam diplomasi ekonomi dengan kerjasama Korea Utara. Maka upaya diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Korea Utara akan dibahas dalam Bab selanjutnya.

BAB 3

MODEL DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA TERHADAP KOREA UTARA PADA MASA PEMERINTAHAN SBY 2004-2014

Fokus diplomasi ekonomi memiliki dua kunci, yaitu peran diplomat sebagai aktor negara dalam Hubungan Internasional dan peran aktor non-negara untuk menjadi lembaga diplomatik dalam perekonomian internasional (Lee and Hocking 2010). Menurut Robert A. Denemark terdapat empat model utama dalam diplomasi ekonomi, yaitu Diplomasi Komersial, Diplomasi Perdagangan, Diplomasi Keuangan, dan Migrasi Pekerjaan Konsuler (Lee and Hocking 2010). Analisa empat model utama dalam diplomasi ekonomi menurut Denemark akan digunakan untuk melihat diplomasi ekonomi yang dilaksanakan oleh Indonesia terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Presiden SBY tahun 2004-2014. Adapun diplomasi ekonomi merupakan cara yang digunakan oleh negara untuk melaksanakan kebijakan luar negeri agar mencapai keamanan ekonomi dalam sistem internasional (Lee and

Hocking 2010). Maka, Indonesia menggunakan diplomasi ekonomi terhadap Korea Utara di masa Presiden SBY untuk melaksanakan kebijakan luar negeri yang saat itu berfokus pada sistem perekonomian global dan kerja sama internasional.

3.1 Diplomasi Komersial

Diplomasi Komersial berfokus dalam membangun hubungan antar diplomat dan juga grup bisnis dalam misi keluar negeri. yang termasuk juga di dalamnya adalah promosi pariwisata, pengetahuan komersial seperti permintaan barang apa saja yang sedang dibutuhkan, *marketing* mengenai pariwisata termasuk juga di dalamnya adalah promosi pariwisata ke negara lain, advokasi bisnis yang berguna untuk membantu bisnis yang sedang berjalan di negara lain. Pada pendekatannya, diplomasi komersial ini dilakukan untuk membangun kerja sama antar negara.

Dampak dari isolasi nuklir terhadap Korea Utara berdampak kepada perekonomian dalam negeri yang menyebabkan Korea Utara bergantung kepada bantuan luar negeri. Hal ini dikarenakan, Korea Utara kekurangan bahan baku, suku cadang, bahan bakar, tenaga listrik, hingga keuangan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat Korea Utara kekurangan makan, oleh sebab itu Korea Utara mengubah arah politik moneter pada tahun 2002 yang telah mendorong kemajuan di sektor perdagangan dan peningkatan ekspor impor dari total Produk Domestik Bruto (PDB) (Deutsche Welle 2006). Perubahan arah politik ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama dalam bidang perekonomian. Melihat perubahan tersebut memberikan peluang bagi negara lain untuk bekerja sama, pemerintah Indonesia pada 15 Mei 2012 diadakan pertemuan antara Presiden SBY dengan Presidium Majelis Tertinggi Rakyat Korea Utara, Kim Yong Nam di Jakarta dalam

acara Presidium (Winarto and Can 2012). Pertemuan ini merupakan frekuensi bagi pertukaran kunjungan pejabat tinggi kedua negara. Hal ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan hubungan bilateral dalam sektor perekonomian dan perdagangan dengan Korea Utara. Peningkatan hubungan bilateral ini didukung dengan kondisi bahwa, pada tahun 2011 Presiden Korea Utara, telah melakukan banyak pembangunan nasional, seperti dalam pembangunan sektor pertambangan, batu bara, gedung bertingkat, toko ritel, hingga supermarket di Ibu Kota Korea Utara, Pyongyang (Ducruet 2008).

Pada tahun 2013 Menlu Indonesia mengirimkan delegasi bisnis Indonesia ke Pyongyang. Pengiriman delegasi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan hubungan bilateral Indonesia-Korea Utara. Dalam pertemuan ini Indonesia-Korea Utara membahas mengenai pembentukan Zona Ekonomi Khusus di setiap provinsi (The Jakarta Post 2013). Menlu Indonesia mengusulkan untuk mengirim delegasi bisnis agar Indonesia dapat menjajaki lebih banyak peluang dari kerjasama ekonomi kedua negara. Selain itu juga adanya pengembangan jaringan bisnis dan keterlibatan UMKM antara Indonesia-Korea Utara agar dapat membangun hubungan yang strategi dan ekonomi kedua negara.

Kunjungan diplomatik menteri luar negeri Korea Utara ke Indonesia dalam upaya negosiasi kerja sama ekonomi memiliki potensi untuk membentuk kerja sama di sektor perdagangan, ekspor impor kedua negara, terdapat juga sektor investasi ekonomi. Korea Utara dalam pertemuan bersama dengan Presiden SBY pada 15 Mei 2012 mengungkapkan keinginannya untuk meningkatkan investasi bagi kedua negara. Investasi ini akan berfokus kepada pembangunan perekonomian negara. Meskipun tidak terdapat data spesifik mengenai jumlah kegiatan ekspor impor kedua negara, akan tetapi produk ekspor dari Indonesia ke Korea Utara paling banyak meliputi minyak kelapa, kopi, dan teh. Hal ini didukung dengan banyaknya produk makanan Indonesia yang beredar di pasar domestik Korea Utara. Adapun produk ekspor Korea Utara ke Indonesia meliputi sektor pertanian dan bahan konsumsi (Novitasari, Hartoyo and Anggraeni 2015). Diplomasi komersial juga melihat bahwa dalam diplomasi ekonomi, pemasaran pariwisata antara Indonesia dan Korea Utara juga menjadi salah satu strategi diplomasi.

3.2 Diplomasi Perdagangan

Diplomasi perdagangan berfokus kepada tawar-menawar untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tawar menawar atau negosiasi ini dilakukan oleh diplomat kepada negara atau aktor politik lainnya dalam perjanjian perdagangan multilateral, regional, maupun bilateral. Dalam diplomasi perdagangan tidak hanya melalui peran negara namun juga peran non-negara dalam hubungan perdagangan multilateral, regional, maupun bilateral. Selain itu, diplomasi perdagangan juga melihat pengembangan perdagangan bebas bilateral antar negara.

Dalam diplomasi perdagangan melihat pada kepada sektor ekspor impor oleh kedua negara. Meskipun Indonesia bukan merupakan tujuan utama Korea Utara untuk melakukan ekspor impor. Di bawah ini Tabel Komoditas Perdagangan antara Korea Utara dengan Indonesia secara umum: (Trading Economics 2001-2022)

Tabel 1. Komoditas Perdagangan Korea Utara

Komoditas Perdagangan Korea Utara	
Ekspor	Impor
Bijih Besi	Minyak Bumi
Logam & Emas	Batu Bara
Semen	Mesin
Tekstil	Mobil
Senjata	Bahan Pangan

Sumber: *Trading Economics*

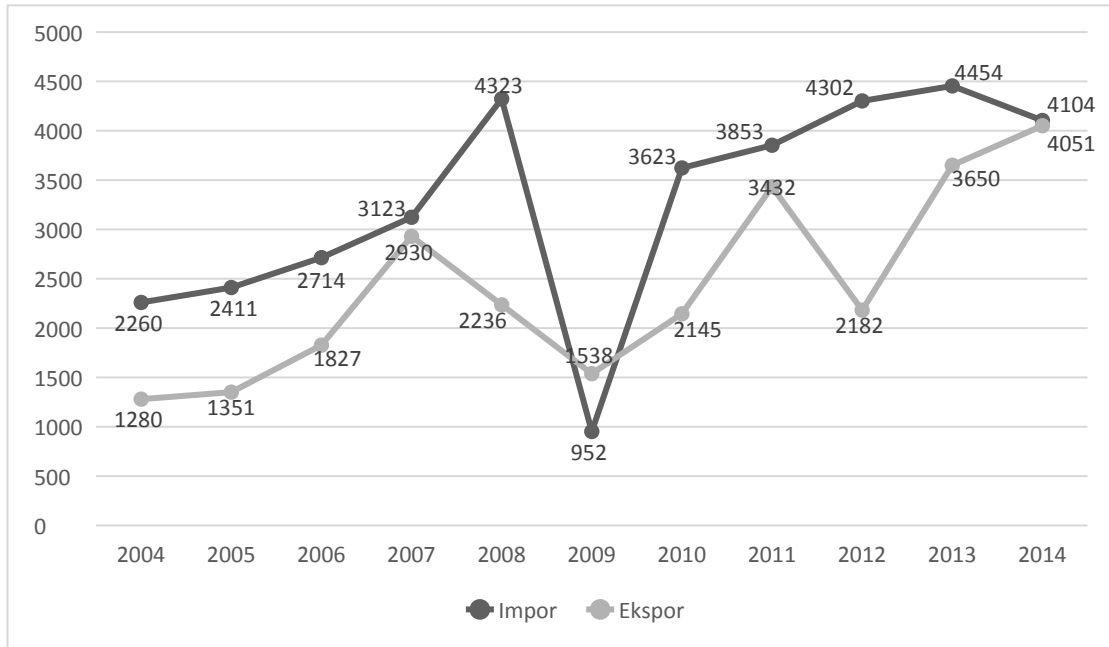
Tabel 2. Komoditas Perdagangan Indonesia ke Korea Utara

Komoditas Perdagangan Indonesia	
Ekspor	Impor
Batu Bara	Makanan Ringan
Bijih Besi	Kopi
Tekstil	Bumbu Masakan

Sumber: *Trading Economics*

Kedua tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa komoditas perdagangan Indonesia dan Korea Utara. Ekspor Korea Utara meliputi bijih besi, logam, emas, semen, tekstil, hingga senjata. Sedangkan produk impor Korea Utara meliputi minyak bumi, mesin, mobil, hingga bahan pangan. Adapun dalam diplomasi perdagangan pemerintah Indonesia dengan Korea Utara mengacu kepada kegiatan ekspor impor. Produk impor dari Indonesia ke Korea Utara berupa makanan, kopi, bumbu masakan, hingga makanan ringan. Sedangkan produk ekspor Korea Utara ke Indonesia berupa batu bara, bijih besi, dan tekstil. Di bawah ini grafik ekspor impor Korea Utara secara umum pada tahun 2004-2014: (Trading Economics 2001-2022)

Grafik 1: Nilai Ekspor Impor Korea Utara tahun 2004-2014 (Ribuan USD)



Sumber: *Trading Economics* (2001-2022)

Akan tetapi produk Indonesia masih terdapat di pasar domestik Korea Utara dan produk Korea Utara ada di pasar domestik Indonesia. Melihat hubungan perdagangan Indonesia dengan Korea Utara hingga pada tahun 2012 sebesar 38 Juta US\$. Presiden SBY menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan hubungan dengan cara investasi yang disampaikan pada 15 Mei 2012 dalam pertemuan presidium (Manurung 2020).

Dalam kurun waktu 2004-2014 nilai ekspor-impor Indonesia dan Korea Utara berlangsung secara fluktuatif. Terdapat beberapa komoditas perdagangan Indonesia ke Korea Utara seperti bijih besi, logam, emas, semen, tekstil, dan sejanta. Besaran nilai komoditas logam, emas, dan tekstil yang tergolong ke dalam industri manufaktur sebesar 7,870 USD. Sedangkan besaran nilai komoditas semen yang tergolong ke dalam industri konstruksi sebesar 3,201 USD. Kemudian besaran nilai komoditas bijih besi yang tergolong ke dalam industri pertambangan sebesar 4,462 USD (Trading Economics 2004-2014). Logam dan emas merupakan komoditas yang berada di urutan pertama dalam perdagangan kedua negara. Pada tahun 2008 perdagangan kedua negara meningkat, salah satu produk impor di Korea Utara berasal dari Indonesia. Meskipun pada tahun 2009 menurun karena adanya sanksi dari PBB terhadap Korea Utara. Dalam lima tahun terakhir perdagangan bilateral kedua negara meningkat sebesar 45% [Trading Economics 2001-2022]. Maka diplomasi perdagangan semakin meningkatkan hubungan kerja sama kedua negara. Serta meningkatkan peran Indonesia dalam diplomasi kedua negara.

3.3 Migrasi dan Pekerja Konsuler

Diplomasi ini berfokus kepada pelayanan visa kembali yang memperlihatkan bagaimana perubahan perekonomian dunia. Di mana saat ini meningkatnya arus pekerja migran. Tingginya arus pekerja migran dari satu negara telah menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi telah berkembang cukup pesat.

Dalam model migrasi dan pekerja konsuler Menlu Indonesia melakukan kunjungan ke Korea Utara dan terdapat bahasan mengenai pembentukan zona ekonomi khusus di setiap provinsi dalam upaya memperluas investasi asing negara

Indonesia dan Korea Utara. Bahkan, pada tahun 2013 Menlu Indonesia mengirimkan delegasi bisnis ke Pyongyang untuk mencari cara agar dapat meningkatkan hubungan ekonomi bilateral (Keck 2013).

Dalam masa pemerintahan SBY hubungan bilateral Indonesia dengan Korea Utara mengenai pekerja migran pada masa tersebut terbatas. Hal ini disebabkan oleh peraturan ketenagakerjaan, kebijakan migrasi, dan permintaan tenaga kerja asing ke Korea Utara tidak ada. Selain itu, Indonesia sering juga menghadapi isu perlindungan dan kesehatan pekerja migran. Kementerian Ketenagakerjaan RI juga menyatakan bahwa Korea Utara tidak tercatat sebagai tujuan migrasi dan pekerjaan konsuler dari pekerja Indonesia (Keck 2013).

Korea Utara bukan merupakan salah satu destinasi utama bagi pekerja migran Indonesia. Kebijakan dan permintaan tenaga kerja asing Korea Utara tidak sebesar negara-negara di kawasan Asia Timur lainnya. Karakteristik rezim Korea Utara yang terisolasi dan adanya pembatasan akses bagi warga asing dapat menjadi kendala bagi penempatan pekerja migran Indonesia di Korea Utara. Sudah adanya upaya dari pemerintah Indonesia untuk mendorong peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia. Namun Korea Utara bukan termasuk dalam tujuan utama Pekerja Migran Indonesia oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Hal ini disebabkan karena rendahnya aktivitas ekonomi dan keterkaitan ekonomi Indonesia dan Korea Utara.

Tabel 3 Bentuk Diplomasi Ekonomi Indonesia ke Korea Utara

Model Diplomasi Ekonomi	Bentuk Kegiatan Diplomasi Ekonomi
Diplomasi Komersial	21-23 Oktober 2012; Menlu Indonesia, Marty Natalegawa melakukan kunjungan tiga hari ke Korea Utara untuk menjajaki peluang perekonomian antar negara.
Diplomasi Perdagangan	<p>15 Mei 2012; dilaksanakan pertemuan antara Presiden SBY dan Presiden Korea Utara untuk meningkatkan investasi. Dengan nilai perdagangan US\$ 38 Juta.</p> <p>Ekspor-Import: Produk Import dari Indonesia ke Korea Utara meliputi produk pertanian, produk tekstil, komoditas mineral (bijih dan karet), barang konsumen seperti perangkat elektronik dan peralatan rumah tangga, makanan dan minuman olahan, hingga barang kerajinan. Sedangkan produk Import dari Korea Utara ke Indonesia, meliputi produk kimia industri, makanan dan minuman, elektronik, tekstil, hingga produk kerajinan.</p>
Diplomasi Keuangan	Tidak dijalankan
Migrasi dan Pekerja Konsuler	Korea Utara bukan merupakan salah satu destinasi utama bagi pekerja migran Indonesia. Kebijakan dan

	<p>permintaan tenaga kerja asing Korea Utara tidak sebesar negara-negara di kawasan Asia Timur lainnya. Karakteristik rezim Korea Utara yang terisolasi dan adanya pembatasan akses bagi warga asing dapat menjadi kendala bagi penempatan pekerja migran Indonesia di Korea Utara. Sudah adanya upaya dari pemerintah Indonesia untuk mendorong peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia. Namun Korea Utara bukan termasuk dalam tujuan utama Pekerja Migran Indonesia oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.</p>
--	---

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Indonesia dan Korea Utara telah memiliki hubungan bilateral yang baik selama lebih dari 50 tahun. Hubungan diplomatik ini dimulai pada 17 Juni 1961. Anggrek Kimilsungia menjadi simbol kekuatan Indonesia dan Korea Utara karena kekaguman Presiden Kim IL Sung. Setiap tahun Anggrek Kimilsungia ditampilkan dalam Festival Bunga Kimilsungia di Korea Utara. Pada 15 Mei 2012 digelar pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presidium Majelis Tertinggi Rakyat Korea Utara, Kim Yong Nam di Jakarta untuk meningkatkan sektor perekonomian dan perdagangan. Selain itu melalui Program Pangan Dunia Indonesia memberikan bantuan senilai 2 Juta Dollar dalam bentuk 1.465 Ton Sawit yang digunakan untuk suplai bahan makanan masyarakat Korea Utara.

Korea Utara juga mengirimkan 2 diplomat untuk mengikuti Kursus Pelatihan Internasional dengan kategori Diplomat Pertengahan Karier ke-11 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Republik Indonesia di Jakarta, pada 20 Oktober-3 November 2013 sebagai bentuk penguatan hubungan bilateral. Pemerintah Indonesia berperan aktif untuk mempromosikan potensi investasi di Indonesia kepada pelaku-pelaku usaha di Korea Utara, seperti di sektor pertanian, energi, dan industri manufaktur. Komoditas ekspor utama Indonesia ke Korea Utara adalah minyak kelapa, kopi, dan teh.

Faktor yang mempengaruhi diplomasi ekonomi terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Korea Utara dan berkesinambungan dengan empat model diplomasi ekonomi menurut Robert A. Denemark yaitu, Diplomasi Komersial, Diplomasi Perdagangan, Diplomasi Keuangan, dan Migrasi Pekerjaan Konsuler.

Diplomasi Komersial; Hubungan kerja sama ekonomi Indonesia dan Korea Utara terbatas, namun terdapat beberapa kegiatan ekspor impor yang berlangsung di antara kedua negara. Salah satu komoditas ekspor utama Indonesia ke Korea Utara adalah kelapa, kopi, dan teh, namun terdapat diversifikasi ekspor Indonesia ke Korea Utara akibat keterbatasan permintaan dan kondisi ekonomi di Korea Utara. Adapun impor Korea Utara ke Indonesia adalah pertanian dan barang-barang konsumsi. Diplomasi perdagangan semakin meningkatkan hubungan kerja sama antar kedua negara yang juga meningkatkan peran aktif Indonesia dalam hubungan diplomasi keduanya.

Diplomasi Perdagangan; Dalam kurun waktu 2004-2014 nilai ekspor impor Indonesia dan Korea Utara fluktuatif. Terdapat beberapa komoditas perdagangan Indonesia ke Korea Utara seperti bijih besi, logam, emas, semen, tekstil, dan senjata. Pada tahun 2008 perdagangan kedua negara meningkat, salah satu produk impor di Korea Utara berasal dari Indonesia. Meskipun pada tahun 2009 menurun karena adanya sanksi dari PBB terhadap Korea Utara. Dalam lima tahun terakhir perdagangan bilateral kedua negara meningkat sebesar 45% [Trading Economics 2001-2022]. Maka diplomasi perdagangan semakin meningkatkan hubungan kerja sama kedua negara. Serta meningkatkan peran Indonesia dalam diplomasi kedua

negara.

Diplomasi Keuangan; untuk menciptakan stabilitas dalam rezim yang tidak memiliki aturan dan hukum mengenai rezim perdagangan internasional dengan menggunakan aktor diplomasi non-tradisional. Dalam strategi diplomasi ekonomi Indonesia ke Korea Utara tidak adanya model pendekatan diplomasi keuangan yang dilakukan dari kedua negara. Hal ini dikarenakan tidak terlihatnya upaya aktif Indonesia dalam menjalankan model strategi ini terhadap Korea Utara, dan tercatat hanya strategi model diplomasi ekonomi lainnya yang dijalankan oleh Indonesia.

Migrasi Pekerjaan Konsuler; Korea Utara bukan merupakan salah satu destinasi utama bagi pekerja migran Indonesia. Kebijakan dan permintaan tenaga kerja asing Korea Utara tidak sebesar negara-negara di kawasan Asia Timur lainnya. Karakteristik rezim Korea Utara yang terisolasi dan adanya pembatasan akses bagi warga asing dapat menjadi kendala bagi penempatan pekerja migran Indonesia di Korea Utara. Sudah adanya upaya dari pemerintah Indonesia untuk mendorong peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia. Namun Korea Utara bukan termasuk dalam tujuan utama Pekerja Migran Indonesia oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Hal ini disebabkan karena rendahnya aktivitas ekonomi dan keterkaitan ekonomi Indonesia dan Korea Utara.

Meskipun kerja sama Indonesia dan Korea Utara tidak selalu berlangsung secara terus menerus. Akan tetapi terdapat faktor-faktor yang mendorong kerja sama Indonesia dan Korea Utara. Dalam kurun waktu 2004-2014 perdagangan kedua negara memang terbatas dan relatif kecil karena Korea Utara mendapatkan sanksi ekonomi dari banyak negara akibat aktivitas nuklir dan pelanggaran HAM. Sehingga, perdagangan menjadi terbatas.

4.2 Rekomendasi

Dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam pembahasan mengenai diplomasi ekonomi antara Indonesia dengan Korea Utara, sehingga peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih mengenai diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh warga Indonesia terhadap Indonesia terhadap Korea Utara di tahun yang terbaru, seperti pada masa Presiden Joko Widodo. Sehingga dapat melihat perkembangan kerja sama kedua negara. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat meneliti sektor diplomasi yang lebih luas, seperti diplomasi Budaya hingga diplomasi sehingga dapat meneliti sektor diplomasi yang lebih luas, seperti diplomasi budaya hingga diplomasi strategis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. 2012. *RI-Korut akan Tingkatkan Hubungan Ekonomi dan Perdagangan*. 15 Mei. <https://investor.id/international/36223/ri-korut-akan-tingkatkan-hubungan-ekonomi-dan-perdagangan>.
- AntaraNews. 2012. *Indonesia sends food aid to North Korea*. 19 September. <https://en.antaranews.com/news/84588/indonesia-sends-food-aid-to-north-korea>.
- Badan Pusat Statistik. 2005-2007. *Neraca Perdagangan beberapa Negara (Juta US\$), 2005-2007*. <https://www.bps.go.id/indicator/8/336/5/neraca-perdagangan-beberapa-negara.html>.
- Ducruet, César. 2008. "Hub dependence in constrained economies: the case of North Korea." *The flagship journal of international shipping and port research Volume 35*.
- Deutsche Welle. 2006. *Korea Utara, Negara Yang Sangat Tergantung Negara Lain*. 11 Oktober. <https://www.dw.com/id/korea-utara-negara-yang-sangat-tergantung-negara-lain/a-2956748>.
- Dianpuri, Setia Ratna. 2012. "Inisiasi Indonesia menjadi Mediator bagi Terwujudnya Perdamaian Antara Korea Utara dan Korea Selatan."
- DetikNews. 2012. *Krisis Pangan Kian Parah, Sejumlah Warga Korut Mati Kelaparan*. 21 Mei. <https://news.detik.com/internasional/d-1921157/krisis-pangan-kian-parah-sejumlah-warga-korut-mati-kelaparan>.
- Herawati, Dewi Maria, dan Made Fitri Maya Padmi. 2020. "Pariwisata Korea Utara: Nation Branding melalui Youtube Travel Vlog." *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, Volume 12, No. 2* 1-18.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pyongyang. 2015. *Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pyongyang, Korea Utara*. <http://www.kemlu.go.id/pyongyang/idPages/Korea-Utara.aspx>.
- Keck, Zachary. 2013. *Why is Indonesia Courting North Korea?* 2 November. <https://thediplomat.com/2013/11/why-is-indonesia-courting-north-korea/>.
- Kim, Samuel Seongseop, Dallen J. Timothy, dan Hag-Chin Han. 2007. "Tourism and political ideologies: A case of tourism in North Korea." *Tourism Management*, 28(4) 1031–1043.
- Kompas. 2015. *Produk Indonesia Rambah Korea Utara*. 17 Mei. <https://money.kompas.com/read/2015/05/17/093749826/Produk.Indonesia.Rambah.Korea.Utara>.
- Kompas. 2012. *PBB: Korea Utara Butuh Bantuan Makanan*. 3 Agustus. <https://megapolitan.kompas.com/read/2012/08/03/14035294/internasionalnews>.
- K. Nanto, Dick, dan Emma Chanlett-Avery. 2007. "The North Korean Economy: Overview and Policy Analysis." *Congressional Research Service*.
- Lee, Donna, dan Brian Hocking. 2010. "Economic Diplomacy." *The International Studies Encyclopedia, Vol. II* 1216-1227.
- Mahamel, Alina. 2012. *RI-Korea Utara Sepakat Tingkatkan Kerjasama*. 16 Mei. https://www.voaindonesia.com/a/ri_korea_utara_sepakat_tingkatkan_kerjasama/666701.html.

- Nanto , Dick K., dan Emma Chanlett-Avery . 2009. "North Korea: Economic Leverage and Policy Analysis." *Congressional Research Service (CRS) Report for Congress*.
- Norhazwani. 2018. "Peran WFP (World Food Programme) dalam Mengatasi Kasus Kelaparan di Korea Utara Tahun 2006-2012." *JOM FISIP Vol. 5: Edisi I* 1-13.
- Novitasari, Wahyu Dyah, Sri Hartoyo, dan Lukytawati Anggraeni. 2015. "Dampak Keterbukaan Perdagangan dan Kinerja Manufaktur di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol 4 No 2* 172-186.
- Ouellette, Dean J. 2016. "The Tourism of North Korea in the Kim Jong-un Era: Propaganda, Profitmaking, and Possibilities for Engagement." *Pacific Focus*, 31(3) 421–451.
- Prastiwi, Arie Mega. 2017. *Negara-Negara yang Berdagang dengan Korea Utara, Indonesia?* 2017 September.
<https://www.liputan6.com/global/read/3100542/negara-negara-yang-berdagang-dengan-korea-utara-indonesia?page=2>.
- Sarigah, Bagus BT. 2012. *Human rights concerns cloud North Korea's leader visit to RI*. 14 Mei. <https://www.thejakartapost.com/news/2012/05/14/human-rights-concerns-cloud-north-korea-s-leader-visit-ri.html>.
- Syafina, Dea Chadiza, dan Asnil Amri. 2012. *Indonesia berniat bantu Korea Utara US\$ 2 juta*. 30 Mei. <https://nasional.kontan.co.id/news/indonesia-berniat-bantu-korea-utara-us-2-juta>.
- Santi, Natalia. 2013. *SBY Kirim Surat untuk Pemimpin Korea Utara*. 22 Oktober. <https://dunia.tempo.co/read/523812/sby-kirim-surat-untuk-pemimpin-korea-utara>.
- Santi, Natalia. 2013. *SBY Kirim Surat untuk Pemimpin Korea Utara*. 22 Oktober. <https://dunia.tempo.co/read/523812/sby-kirim-surat-untuk-pemimpin-korea-utara>.
- Trading Economics. 2001-2022. *Ekspor-Import Korea Utara*. <https://id.tradingeconomics.com/north-korea/imports>.
- Trading Economics. 2004-2014. *Neraca Perdagangan Korea Utara*. <https://id.tradingeconomics.com/north-korea/balance-of-trade>.
- The Jakarta Post. 2013. *RI seeks closer economic ties with North Korea*. 24 Oktober. <https://www.thejakartapost.com/news/2013/10/24/ri-seeks-closer-economic-ties-with-north-korea.html>.
- Tempo. 2012. *Indonesia Beri Bantuan US\$ 2 Juta Buat Korea Utara*. 31 Mei. <https://dunia.tempo.co/read/407350/indonesia-beri-bantuan-us-2-juta-buat-korea-utara>.
- Winarto, Yudho, dan Edy Can. 2012. *Korea Utara ingin tingkatkan kerjasama investasi*. 15 Mei. <https://nasional.kontan.co.id/news/korea-utara-ingin-tingkatkan-kerjasama-investasi>.
- Yuniati, Sri, Linda Dwi Eriyanti, dan Ario Bayu Utama. 2014. "yang berjudul Keuntungan Indonesia dengan Adanya Kerjasama Ekonomi AKFTA (Asean-Korea Free Trade Area) dalam." *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa* 1-9.
2020. "Indonesia-North Korea Diplomatic Relations: Effort to Pursue Nation Interest

and Create Regional Peace.” *Politica Vol. 11 no. 2* 223-244.